

**PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM
DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN
SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

NIKMAH FAUZIAH

NIM. 1617303032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM DI
KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF *FIQH SIYA>SAH***

ABSTRAK

Nikmah Fauziah

NIM. 1617303032

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

Purwokerto

Kemiskinan dalam berbagai tampilan telah memberikan dampak yang tidak baik untuk kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Untuk menimalisir permasalahan kemiskinan maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah kelurahan memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum, secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pemerintah kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siya>sah* terhadap program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *fiqh siya>sah*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, kepala kelurahan dan masyarakat kampung Sri Rahayu, serta buku-buku *fiqh siya>sah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah kelurahan Karangklesem di kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial telah dijalankan tetapi belum bisa mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari pekerjaan yang belum berubah dan pemanfaatan program pemerintah yang masih digunakan secara konsumtif. Hal ini disebabkan karena kontrol pemerintah terhadap berjalannya program perlindungan sosial yang sangat minim dan budaya kemiskinan dalam masyarakat kampung rahayu yang sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena mental yang terbentuk sejak lama dan turun temurun. Program perlindungan sosial di kampung Sri Rahayu juga sudah sejalan dengan persoalan-persoalan *siya>sah dustu>riyyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Tetapi, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan kehormatan kepada seluruh warga kampung rahayu. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warga yang memiliki pekerjaan sebagai Pekerja Seks komersial dan waria.

Kata kunci: *Perlindungan Sosial, Kemiskinan, Fiqh siya>sah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Kerangka Teorik.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Negara Kesejahteraan	24
B. Pemerintah Kelurahan	26
1. Pengertian Kelurahan.....	26
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	27
C. Perlindungan Sosial	30
1. Pengertian Perlindungan Sosial	30
2. Konsep Perlindungan Sosial	32
D. Pengentasan Kemiskinan	37
1. Pengertian Kemiskinan.....	37
2. Indikator Kemiskinan	39
3. Jenis-Jenis Kemiskinan.....	41
4. Pengentasan Kemiskinan.....	43
E. <i>Fiqh Siya>sah</i>	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data.....	60

BAB IV PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANG KLESEM DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN	
KEMISKINAN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYA<SAH</i>.....	61
A. Profil Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	61
B. Implementasi Program Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Sri Rahayu	67
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	67
2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	72
3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)	75
C. Analisis <i>Fiqh siya>sah</i> Terhadap Program Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	81
1. Kewajiban-Kewajiban Imam.....	81
2. Hak dan Kewajiban Rakyat	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	62
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	63
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan dan merupakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang ditandai adanya berbagai ketimpangan sosial. Menurut Emil Salim kemiskinan yaitu mereka yang pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat tidur dan lain-lain.¹ Berbicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu yang baru, melainkan isu yang seolah abadi sepanjang jaman. Betapa menggelisahkan, kemiskinan masih saja tetap dominan, pada era yang sudah semakin canggih ini, bahkan kemajuan jaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan modernitas, di satu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia.² Namun sampai saat ini, persoalan kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.³

Dalam rangka pengentasan kemiskinan terdapat penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dapat diartikan sebagai upaya membendung jumlah penduduk miskin agar tidak semakin bertambah banyak. Sedikit berbeda dengan pemberdayaan masyarakat yang berarti upaya membangun kesadaran orang miskin agar

¹ Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 102.

² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 3.

³ Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan", *Jurnal Socius*, Vol. XIV (Oktober-Desember 2013), hlm. 56.

melakukan keswadayaan yang berkelanjutan yang dilakukan di semua lini kegiatan sosial-ekonomi.⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk guna memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan telah dijadikan pilihan mekanisme untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum, secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, karena kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik.⁵

Tercermin juga pada pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kemudian pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.⁶

⁴ Mahfud MD dkk, *Proseding Kongres Pancasila IV Starategi Pelebagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329.

⁵ Andy Rianto, "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 5.

⁶ Widji Ramadani, "Inovasi Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial Dan Penganggulungan Kemiskinan (Studi Di Badan Pust Statistik Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 2.

Untuk menimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil. Perlindungan sosial juga sangat berdampak dalam pengentasan kemiskinan.⁷

Soeharto mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan pemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara.⁸ Perlindungan sosial dalam penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial, bantuan sosial tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Harapan (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sistem pembangunan selama ini yang bersifat *top down*, yang memposisikan desa hanya sebagai “robot” dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten menjadikan desa teralienasi dari

⁷ Cita Fauziatul Aklama, “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 2.

⁸ Yonathan Pasaribu, “Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur terhadap kemiskinan di indonesia tahun 2010-2013 (studi kasus 3 provinsi di indonesia)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 9-10.

makna desa itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Desa memungkinkan desa untuk menjadi “diri sendiri” dalam mengelola dan mengatur desa untuk bisa sesuai dengan keinginan bersama masyarakat. Ruh desa sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kondisi sosial setempat kali ini kembali dalam genggamannya, desa bukan lagi hanya sebagai pelaksana aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya.⁹

Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menjadi tidak miskin sangat penting. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu fungsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada fungsi tersebut.¹⁰

Dalam hal ini, diperlukan sebuah rangkaian pengembangan kapasitas aparatur dan *stakeholders* pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan

⁹ Sardiyoko, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-Undang Desa”, <http://csws.fisip.unair.ac.id/2018/04/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-dalam-menghadapi-pelaksanaan-undang-undang-desa-sardiyoko/> diakses pada 20 Januari 2020, pukul 15:25 WIB.

¹⁰ Yonatan Pasaribu, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)”..., hlm. 5.

pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau *stakeholder* untuk mengatasi persoalan besar ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah di Rezim Orde Baru maupun pada Era Reformasi untuk menaggulangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini, faktanya berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun sampai sekarang kemiskinan tetap ada.¹²

Kemiskinan adalah masalah utama yang ada di Negara kita. Himpitan ekonomi yang semakin mencekik golongan menengah kebawah di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh rakyat pinggiran di ibu kota. Kota Satria yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas ternyata ikut merasakan juga himpitan ekonomi tersebut. Hal itu tergambar pada sebuah kampung di Purwokerto Kabupaten Banyumas, bernama Kampung Sri Rahayu. Kurangnya penanganan dari pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap

¹¹ Hendri, "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", <https://lihatkepri.com/2017/11/09/peran-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-desa/>, diakses pada 24 Januari 2020 pukul 20:20.

¹²Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan",...hlm. 56-57.

tingginya angka kemiskinan yang ada serta rendahnya pendidikan, dan minimnya lapangan kerja, membuat warga dari kampung ini hanya mengandalkan kemampuannya yang terbatas.

Menurut ketua Rw.10 Kampung Sri rahayu Karangklesem, masyarakatnya bekerja sebagai pengemis yang setiap hari menjadi pengemis di pasar, terminal, bahkan sampai ke luar kota seperti Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap. Menjadi pengemis merupakan alternatif pekerjaan yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan merupakan penyakit masyarakat yang berkembangbiak di kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem. Hal ini disebabkan menjadi pengemis adalah penyakit menular dan turun-temurun setiap tahunnya, yang disebabkan adanya perjodohan antara anak pengemis dengan anak pengemis, sehingga mereka mengikuti pekerjaan orang tuanya menjadi pengemis. Menjadi pengemis juga tidak membutuhkan SDM yang tinggi, pekerjaannya juga sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja dan tidak membutuhkan modal. Melihat kehidupan di kampung pengemis Sri Rahayu ini, tentunya kita sangat prihatin, padahal sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingginya angka pengemis di kampung sri Rahayu.

Semua pekerjaan yang sedikit menyimpang ada disini seperti gelandangan, pengemis, PSK (PSK cewe, PSK gigolo, PSK waria), copet, preman, dan segala bentuk pekerjaan yang tidak wajar hampir lengkap ada disini. Bedakan dengan Doli di Surabaya dan Sarkem di Jogja permasalahan kedua tempat tersebut yaitu prostitusi. Sedangkan di kampung Sri Rahayu

warganya memiliki permasalahan yang sangat kompleks, lebih dari sekedar prostitusi. Kebanyakan dari mereka yang masih menetap di kampung tersebut dan berusaha mencari pekerjaan lain seperti kuli ataupun berjualan, pasti mereka akan kembali ke pekerjaan mereka yang dulu.¹³

Kampung Sri Rahayu (Kampung Dayak) dengan kompleksitasnya permasalahan sosial perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan, untuk mengentaskan mereka dari jurang kenistaan dan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan moral dan mental adalah biangnya. Dimana beberapa permasalahan sosial yang ada di sebabkan juga oleh kemiskinan mental dan moral manusia itu sendiri, maka banyak hal yang harus di lakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan para penyandang masalah sosial itu sendiri. Mengingat bahwa salah satu mandat negara adalah untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat.

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa'/4: 58

¹³ Yayasan Sri Rahayu, "Mengupas Masalah Di Kampung Sri Rahayu" <http://faradina08.blogspot.com/2016/04/sejuta-permasalahan-di-kampung-sri.html?m=1> diakses pada 25 Januari 2020 pukul 15:45 WIB.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki skill atau keterampilan sesuai kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Namun dengan data pemerintah masih banyak penduduk kemiskinan yang belum terdaftar sebagai penerima Program-Program pemerintah kota, oleh karena itu kebutuhan manusia yang bermacam-macam adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, dan kesenjangan sosial, ketiadaan jaminan masa depan. hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk kurang mampu hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas.¹⁴

¹⁴ Budi Santoso, “Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm. 2-4.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara menurut Islam (*Welfare State*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya *fiqh siya>sah*. Dalam *fiqh siya>sah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan yang memegang penuh masyarakat tentunya ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siya>sah*. Dalam *fiqh siya>sah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.¹⁵ Secara garis besar *fiqh siya>sah* dibagi dalam tiga, yaitu: *siya>sah dustu>riyyah* (politik perundang-undangan), *siya>sah dauliyah/Siya>sah kha>riyyah* (politik luar negeri), dan *siya>sah ma>liyyah* (politik keuangan dan moneter).¹⁶

Menurut Djazuli *Fiqh siya>sah dustu>riyyah* mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Permasalahan didalam *siya>sah*

¹⁵ Erlina Muji Utami, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif *Maqasid Syari'ah*", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm. 2-3.

¹⁶ Syahrir Rozi, "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, hlm. 17.

dustu>riyyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan *siya>sah dustu>riyyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, status dan hak-haknya.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem Di Kampung Sri Rahayu Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif *fiqh siya>sah* .

B. Definisi Operasional

1. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan atau Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Karangklesem.

2. Perlindungan Sosial

Merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga sejahtera (*well being*) dan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 47.

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 167.

miskin dan bantuan untuk menghadapi berbagai guncangan.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud Perlindungan Sosial dalam penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial, bantuan sosial tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Harapan (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Walaupun ketiga program tersebut adalah program pemerintah pusat, namun implimentasi di tingkat kelurahan juga mengharuskan adanya keterkaitan dan kesinambungan, maka ketiga program tersebut juga menjadi prioritas kelurahan. Dimana hal itu juga program pemerintah kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Kemiskinan

Merupakan diskursus yang masih berada disepular kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menurut Tjokrowinoto kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerantanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses pada peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasr, dan kemiskinan terefleksi dalam buda kemiskinan yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan di kampung Sri Rahayu.

¹⁹ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), hlm. 128.

²⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*,...hlm. 27-28.

4. *Fiqh siya>sah*

Merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²¹ Dalam konteks penelitian ini *fiqh siya>sah* yang digunakan oleh peneliti adalah *siya>sah dustu>riyyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, status dan hak-haknya.

5. Sri Rahayu

Desa Sri Rahayu sering juga disebut Kampung Dayak. Secara geografis dan administratif, kampung seluas kurang lebih 2 hektare ini bagian dari Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Menyebut Kampung Sri Rahayu atau Kampung Dayak, stigma negatif akan selalu melekat. Pasalnya, wilayah ini identik dengan kampungnya para gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial, waria dan anak terlantar.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

²² Radar Banyumas, "Sri Rahayu, Kampung Kumuh di Tengah Kota", <http://radarbanyumas.co.id/sri-rahayu-kampung-kumuh-di-tengah-kota/> diakses pada 30 Januari 2020 pukul 22:15 WIB.

1. Bagaimana Implementasi Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ?
2. Bagaimana Pandangan *fiqh siya>sah* terhadap Program Pemerintah Kelurahan Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemerintah kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siya>sah* terhadap program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagai berikut:

1. Berdasarkan manfaat secara teoritis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat di kampung Sri Rahayu mengenai program perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di suatu wilayah dan solusinya. Secara teoritis manfaat

penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan program kerja pemerintah kelurahan Karangklesem dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

Hasil penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun pemerintah kelurahan Karangklesem yang secara khusus menangani masalah kemiskinan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sh* . Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

No	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1	Fatimatuz Zuhro, 2019, Universitas Negeri Sunan Ampel,	Realita yang terjadi di lapangan mengenai	Terletak pada penggunaan <i>fiqh</i>	Penelitian Fatimatuz Zuhro membahas mengenai program

	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif <i>fiqh siya>sah</i></p>	<p>pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang kurang sesuai dan pelaksanaan PKH di desa Banyuarang sejalan dengan tujuan yang dimiliki <i>siya>sah syar'iyah dan siya>sah maliyyah</i></p>	<p><i>siya>sah</i> sebagai pisau analisis penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya dan menggunakan perspektif <i>siya>sah dustu>riyyah</i></p>	<p>perlindungan sosial keluarga harapan (PKH) dalam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya dan menggunakan perspektif <i>siya>sah dustu>riyyah</i></p>
2	<p>Indah Ayuning Tias, 2017, UIN Raden Intan, Analisis Peran Program Kartu Perlindungan</p>	<p>Peran program KPS di Desa Purworejo belum mampu mengentaskan kemiskinan</p>	<p>sama-sama menganalisis tentang program perlindungan</p>	<p>Indah Ayuning Tias fokus membahas mengenai peran program kartu perlindungan sosial</p>

	Sosial (KPS) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam	masyarakat penerima bantuan program KPS di Desa Purworejo	an sosial dalam pengentas an kemiskina n	(KPS) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya
3	Ummi Nurul Hidayah, 2018, Universitas Islam Negeri Walisono, Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa	Pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di desa Tambakbulusan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar meskipun adanya kendala- kendala yang terjadi	sama- sama menganali sis tentang pengentas an kemiskina n	Ummi Nurul Hidayah fokus membahas tentang strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada program pemerintah tentang perlindungan sosial

Tambakbulusan			
Kecamatan			
Karangtengah			
Demak			

Skripsi karya Fatimatuz Zuhro dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *fiqh siya>sah* ” dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realita yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang masih kurang sesuai. Pendampingan PKH mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah keatas.²³ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah terletak pada penggunaan *fiqh siya>sah* sebagai pisau analisis penelitian. Perbedaannya Penelitian Fatimatuz Zuhro membahas mengenai program perlindungan sosial keluarga harapan (PKH) dalam perspektif *siya>sah maliyyah* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya dan menggunakan perspektif *siya>sah dusturiyyah*.

²³ Fatimatuz Zuhro, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.

Skripsi karya Indah Ayuning Tias dengan judul “Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS” dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dilakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Kartu Perlindungan Sosial di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, sedangkan berdasarkan 2 indikator pengentasan kemiskinan yaitu tingkat kebutuhan dasar dan tingkat kehidupan, bahwa program KPS belum dikatakan mampu memenuhi seluruh indikator tersebut.²⁴ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang program perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Perbedaannya adalah Indah Ayuning Tias fokus membahas mengenai peran program kartu perlindungan sosial (KPS) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya.

Skripsi karya Ummi Nurul Hidayah dengan judul “Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)” dari Program Studi Ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN walisongo semarang yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil

²⁴ Indah Ayuning Tias, “Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Intan, 2017.

penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat program pembangunan desa dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan desa, konsep pembangunan desa memahami cara pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian.²⁵ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Perbedaannya yaitu Ummi Nurul Hidayah fokus membahas tentang strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada program pemerintah tentang perlindungan sosial.

Berdasarkan penelusuran pustaka ini penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu, maka kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang program pemerintah kelurahan Karang Klesem di Kampung Dri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sah* atau lebih menghususkan kepada kemaslahatan umat.

G. Kerangka Teoritik

Pelaksanaan program perlindungan sosial terhadap masyarakat merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga sejahtera (*well being*). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perlindungan sosial bagi seluruh anggota keluarga. Perlindungan sosial bertujuan untuk memberikan

²⁵ Ummi Nurul Hidayah, "Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

dukungan kepada keluarga miskin dan bantuan untuk menghadapi berbagai guncangan.²⁶ Dalam buku “Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan” karangan Djonet Santoso menjelaskan bahwa secara nasional maupun di tingkat daerah, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar, memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan yang inklusif. Prinsip pertama, adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Prinsip kedua, adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Prinsip ketiga, adalah memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Prinsip keempat, adalah membangun yang inklusif, diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan di daerah atau percepatannya diupayakan dengan strategi: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan

²⁶ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*,...hlm. 128.

masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.²⁷

Negara kesejahteraan adalah model pembangunan dimana negara berperan aktif untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan hidup sehat. perlindungan dan pelayanan sosial secara universal adalah menjadi kewajiban negara. Pemberian pelayanan sosial dan perlindungan sosial yang partikularistik dan selektif merupakan pengingkaran negara terhadap fungsi, filosofi, dan jati diri dimana para pendiri bangsa sepakat mendirikan negara ini. Dalam konteks Indonesia, justru gagasan negara kesejahteraan ini menjadikan mandat utama dalam konstitusi kenegaraan. Dalam sila ke-5, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara tidak langsung mengafirmasi itu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa bangsa ini sejak pembentukannya sudah menggariskan visi tentang negara kesejahteraan sosial, meskipun tidak menggunakan istilah itu sejak awal. Sehingga pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk menolak amanah tanggung jawab etis mewujudkan visi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat secara umum.²⁸

Dalam buku “*Fiqh siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*” karangan Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan didalam *siya>sah dustu>riyyah* adalah hubungan antara

²⁷ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 263-264.

²⁸ R. Sadam Al-Jihad, *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 64-65.

pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siya>sah dustu>riyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) persoalan dan ruang lingkup pembahasan, (2) persoalan imamah, hak, dan kewajibannya, (3) persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya, (4) persoalan *bai'at*, (5) persoalan *waliyul ahdi*, (6) persoalan perwakilan, (7) persoalan *ahlul halli wal aqdi*, (8) persoalan *zuwaroh* dan perbandingannya.²⁹ Penulis menggunakan buku tersebut karena dalam skripsi ini akan membahas tentang *fiqh siya>sah* yang lebih dikhususkan ke arah kemaslahatan umat.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

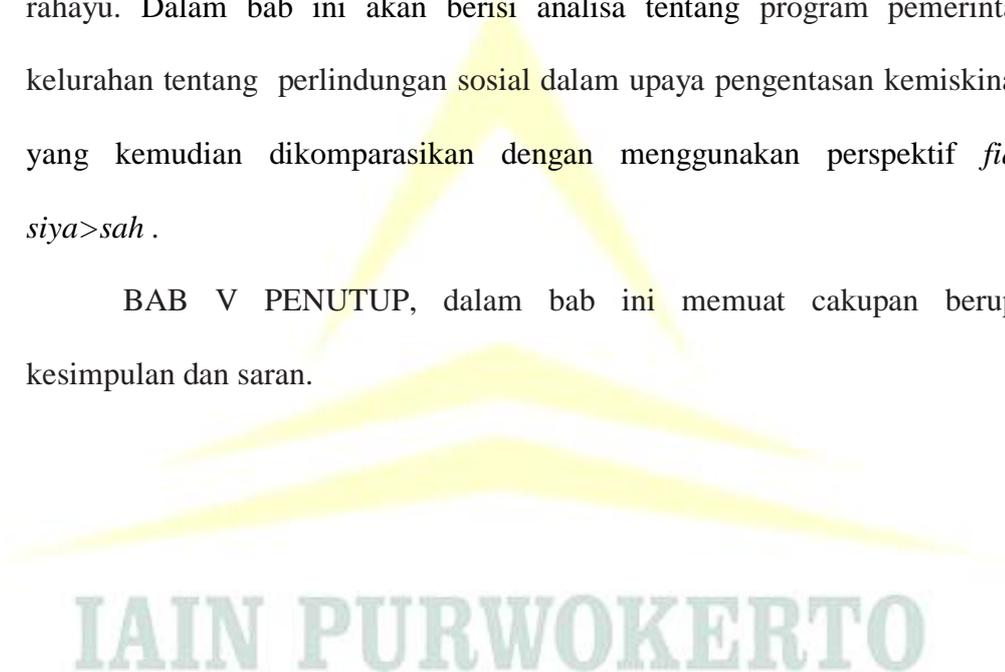
BAB II TELAAH PUSTAKA, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang Negara Kesejahteraan, Pemerintah Kelurahan, Perlindungan Sosial, Kemiskinan dan membahas mengenai *fiqh siya>sah* .

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*hlm. 47.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai implementasi program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sah* di Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri rahayu. Dalam bab ini akan berisi analisa tentang program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan yang kemudian dikomparasikan dengan menggunakan perspektif *fiqh siya>sah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan tetapi belum berhasil mengentaskan kemiskinan, Hal tersebut terlihat dari pekerjaan yang belum berubah dan pemanfaatan program pemerintah yang masih digunakan secara konsumtif. Hal ini disebabkan karena dari sisi kelembagaan dapat dilihat bahwa pemerintah kelurahan Karangklesem sudah melaksanakan program perlindungan sosial tetapi belum berhasil mengentaskan kemiskinan, yang dibuktikan dengan kontrol pemerintah terhadap berjalannya program yang sangat minim. Selain itu pemerintah juga belum maksimal dalam pendampingan terhadap program pelatihan di kampung sri rahayu. Sehingga kegiatan pelatihan hanya sekedar formalitas belaka, tanpa penerapan yang matang dan maksimal. Dan dari sisi budaya, di kampung sri rahayu mempunyai kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakatnya yaitu kemiskinan. Masyarakat kampung rahayu sudah terbiasa menerima bantuan tanpa mengolah dana bantuan dengan baik dan beranggapan bahwa dana bantuan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana dana yang disalurkan oleh

pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan primer, namun justru beralih untuk memenuhi kebutuhan tersier. Seperti rokok dan sebagainya. Budaya kemiskinan dalam masyarakat kampung rahayu sudah sangat sulit untuk dipisahkan karna mental yang terbentuk sejak lama dan turun temurun. Hal tersebut sangat menghambat tercapainya tujuan program perlindungan sosial.

2. Dilihat dari perspektif *fiqh siya>sah* dalam bagian *siya>sah dustu>riyyah*, program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu dalam pengentasan kemiskinan sudah sejalan dengan persoalan-persoalan *siya>sah dustu>riyyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Tetapi, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan kehormatan kepada seluruh warga kampung Rahayu. Dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang memiliki pekerjaan sebagai PSK dan waria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai program pemerintah kelurahan karangklesem di kampung sri rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sah* maka diberikan beberapa saran sehingga menjadi alternative dalam membantu menimalisir kendala ataupun meyempurnakan program tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem perlindungan sosial di kampung Sri Rahayu, lebih aktif dalam melakukan

kegiatan pendataan masyarakat dan lebih kreatif dan inovatif agar masyarakat tidak merasa jenuh dan bosan dengan program pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan.

2. Bagi masyarakat, agar lebih semangat untuk merubah kebiasaan hidupnya supaya terbebas dari kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainudin. "Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif *Fiqh siya>sah* Dusturiyah". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Aklama, Cita Fauziatul. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Anggleni, Andela. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 1 No. 1. 2018. 30.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta. 1996.
- Banyumas, Dinsosnakertran Kabupaten Dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Purwokerto. "Assesment Psikososial Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan. 2016.
- Banyumas, Radar. "Sri Rahayu, Kampung Kumuh di Tengah Kota", <http://radarbanyumas.co.id/sri-rahayu-kampung-kumuh-di-tengah-kota/>.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Dewi, Dinda Silviana. "cara dan prosedur dapatkan kartu sembako murah". <http://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/cara-dan-prosedur-dapatkan-kartu-smbako-murah->
- Djazuli, H. A. *Fiqh siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Draf Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2010.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2. 2019. 253.

- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.
- Fuadi, Ariza. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme”. *Jesi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. V No. 1. 2015. 16. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JES/article/download/190/185>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Halim, Abd. Halim. *Realisasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS. 2013.
- Hendri. “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. <https://lihatkepri.com/2017/11/09/peran-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-des/>.
- Hidayah, Ummi Nurul Hidayah. “Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siya>ah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 2001.
- Jailani, Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. 2011.
- Jihad, R. Sadam. *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet. 2018.
- Josep. *Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Indocamp. 2018.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *pedoman umum penyelenggara program keluarga harapan*. 2013.
- Kurniawan, Luthfi J, Dkk. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

- Lase, Justin. Definisi dan Manfaat Perlindungan Sosial. <http://justinlase.blogspot.com/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html?m=1>.
- Mankiw, N. Gregory, Dkk. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- MD, Mahfud dkk. *Proseding Kongres Pancasila IV Starategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM. 2012.
- Moniung, Rikal Eben Dkk, "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16416/15913>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Pasaribu, Yonatan. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996.
- Pulungun, J. Suyuti. *Fiqh siya>sah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Rahayu, Yayasan Sri. "Mengupas Masalah Di Kampung Sri Rahayu". <http://faradina08.blogspot.com/2016/04/sejuta-permasalahan-di-kampung-sri.html?m=1>.
- Ramadani, Widji. "Inovasi Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial Dan Penganggulangan Kemiskinan (Studi Di Badan Pust Statistik Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016.
- Ras, Atma. "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan", *Jurnal Socius*. Vol. XIV. 2013. 56. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/download/555/380> .
- Rianto, Andy Rianto. "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa

- Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- Rozi, Syahrir Rozi. “Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siya>sah* Syar’iyyah”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Samsuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press. 2013.
- Samsudin, Harun. *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Sumatera Selatan: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin. 2019.
- Santoso, Budi. “Pandangan Fiqih *Siya>sah* Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018.
- Santoso, Djonet. *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Sardiyoko. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-Undang Desa”. <http://csws.fisip.unair.ac.id/2018/04/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-dalam-menghadapi-pelaksanaan-undang-undang-desa-sardiyoko/>.
- Setiyono, Budi. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2018.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press UIN. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharto, Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Suharto, Edi. “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan”. *Sosiohumaniora*. Vol. 17 No. 1. 2015. 22. <http://core.ac.uk/download/pdf/295384422.pdf>.
- Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. *Jurnal Sospol*. Vol. 2 No. 1. 2016. 108. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4759/4900>.
- Sulistiyani, Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media. 2004.

- Suprihatini, Amin. *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi. 2010.
- Suprihatini, Amin. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih. 2018.
- T, Kansil. C. S. *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalis Indonesia. 1988.
- Tambunan, Tulus. T.H. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Terbatas, *Program Peneanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik. 2011.
- Tias, Indah Ayuning. "Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Intan. 2017.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Utami, Erlina Muji. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019.
- Yuningsih, Yuyu. *Perlindungan Sosial Pekerja Ana*. Yogyakarta: Pandiva Buku. 2017.
- Zuhro, Fatimatuz. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh siya>sah*". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Zulkarnain. Muh. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaanmasyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Goa". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanudin. 2017.